Kesiapan Sekolah dalam Mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP):

Kasus Beberapa SMA di Kota dan Kabupaten Bogor

Oleh : Pudji Muljono*)

Pada tahun 2006 pemerintah memberlakukan kurikulum baru yang disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesiapan sekolah dalam menerapkan kurikulum tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survei dan analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif, AHP dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum SMA di Kota dan Kabupaten Bogor, baik swasta maupun negeri memiliki tingkat pemahaman yang cukup tentang KTSP dan mereka menyatakan siap untuk melaksanakan KTSP. Hal ini menunjukkan bahwa SMA-SMA di Kabupaten dan Kota Bogor telah memperoleh informasi yang cukup tentang KTSP, baik informasi dari Dinas Pendidikan setempat, informasi dari media massa, akses ke internet, dan sebagainya. Namun demikian, kesiapan implementasi tersebut belum dapat diwujudkan secara konkrit di tingkat lapangan karena berbagai kendala antara lain kualitas SDM guru yang tidak menunjang, sarana pembelajaran yang terbatas, input kualitas awal siswa yang rendah, tingkat pemahaman yang beragam tentang KTSP dan sebagainya. Strategi dan langkah-langkah operasional yang perlu ditempuh dalam mempersiapkan penerapan KTSP utamanya adalah dengan meningkatkan kualitas manajemen sekolah.

Kata kunci: *kurikulum, satuan pendidikan, sekolah menengah atas*

*) *Pudji Muljono adalah Staf Pengajar Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu elemen penting dalam rangka peningkatan mutu pendidikan agar peserta didik mampu bersaing adalah elemen kurikulum. Melalui perbaikan kurikulum diharapkan proses pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang cerdas dan kompetitif serta relevan dengan arah pembangunan di Indonesia. Oleh karenanya kurikulum hendaknya bersifat fleksibel sesuai dengan tuntutan pembangunan yang berada dalam era kesejagatan. Kurikulum merupakan rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan berbagai ragam tipe lokasi, ragam budaya dan potensi alam Indonesia, hendaknya kurikulum dapat mengadopsi keragaman tersebut untuk mengoptimalkan pemanfaatan perbedaan dan keragaman potensi tersebut.

Pada tahun 1994, pemerintah telah menetapkan Kurikulum Nasional yang sesuai saat itu dengan kondisi yang sedang berkembang untuk memfasilitasi pencapaian tujuan pendidikan nasional. Namun, perkembangan dunia global mengarahkan bangsa-bangsa pada tatanan persaingan, yang mendorong pelakunya untuk menunjukkan keunggulan, baik keunggulan lokal maupun global. Untuk ini, dalam proses pendidikan, elemen kurikulum harus menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan pembangunan, yaitu yang semula berbasis isi sekarang menjadi berbasis kompetensi melalui Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pergeseran kurikulum ini belum banyak dipahami oleh masyarakat pendidik secara menyeluruh, sehingga terjadi berbagai ragam persepsi di masing-masing satuan pendidikan. Selain keragaman persepsi juga terdapat keragaman sumber dan jumlah anggaran pendidikan, kualitas guru, kualitas manajemen sekolah.

Selanjutnya, pada tahun 2006 pemerintah telah memperbarui kurikulum dengan terbitnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang lebih memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menyusun tujuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum serta penjadwalan pendidikan sampai silabus pengajaran. Keleluasaan ini hendaknya disikapi secara positif oleh sekolah sebagai wahana kreativitas sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang relevan

dengan pembangunan daerah dan pusat. Melalui KTSP sekolah akan mengembangkan kurikulum berpusat pada potensi dan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan kehidupan di masyarakat, senantiasa tanggap pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni (ipteks), bersifat menyeluruh untuk mendorong peserta didik agar mampu belajar sepanjang hayat.

Dalam rangka implementasi KTSP ini, perlu sebuah kajian untuk mengetahui tingkat kesiapan sekolah dalam menerapkan KTSP dengan baik, efisien dan efektif. Ada sekolah yang sudah sangat siap atau bahkan sangat tidak siap yang ditunjukkan oleh beberapa indikator tertentu. Pemetaan kesiapan ini sangat diperlukan dalam rangka mempermudah pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya peningkatan mutu pendidikan di tiap wilayah. Dengan terumuskannya indikator kesiapan sekolah untuk mengimplementasikan KTSP maka akan mempermudah pemerintah daerah dan sekolah untuk mengevaluasi diri dalam rangka menyusun strategi dan langkah operasional untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan daerahnya.

KTSP yang disosialisasikan saat ini menghendaki agar sekolah memiliki kreativitas yang tinggi dalam menggali potensinya dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menemukan dan mengembangkan keunggulan demi tercapainya mutu pendidikan. KTSP jangan diartikan sebagai kurikulum coba-coba yang keberhasilannya setengah-setengah. Namun, KTSP diartikan sebagai optimisme untuk meraih mutu pendidikan yang lebih baik sebagai sebuah kendaraan untuk siap dalam persaingan bangsa di masa yang akan datang, karena mampu mencetak insan cerdas dan kompetitif.

Permasalahannya adalah sejauh manakah kesiapan sekolah (kepala sekolah, komite sekolah, guru dan siswa) dalam menghadapi perubahan kurikulum tersebut? Apakah indikator kesiapan sekolah dalam implementasi KTSP tersebut? Apakah unsur-unsur pendukung penerapan KTSP? Apakah perubahan kurikulum tersebut akan diikuti oleh perubahan mental para pelaksananya? Mengingat pada saat ini angka partisipasi kasar SMA masih rendah dibandingkan dengan tingkat di bawahnya, maka kajian ini difokuskan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) khususnya di kota dan kabupaten Bogor.

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk : (1) mengetahui bagaimana gambaran pemahaman sekolah tentang KTSP; (2) mengidentifikasi indikator-indikator kesiapan sekolah dalam menerapkan KTSP; dan (3) menyusun strategi dan langkah-langkah operasional yang perlu ditempuh dalam mempersiapkan penerapan KTSP.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengambil langkah-langkah operasional dalam mensosialisasikan, eksternalisasi dan internalisasi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Selain itu, bagi sekolah, penelitian ini dapat dijadikan masukan yang baik dalam mengevaluasi diri tentang kesiapan serta tindak lanjut dalam peningkatan mutu pendidikan. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk menyusun rencana operasional dalam membantu pemerintah dan sekolah dalam mencapai mutu pendidikan yang diinginkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di daerah.

2. Kajian Teoritis dan Kerangka Konseptual

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Pengertian Kurikulum

Istilah "kurikulum" memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dahulu sampai dengan dewasa ini. Tafsiran tersebut berbeda-beda antara satu dengan lainnya, sesuai dengan titik berat inti dan pandangan dari pakar bersangkutan. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni "curriculae", artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada waktu itu, pengertian kurikulum adalah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah (Hamalik, 2005).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2003 pada Pasal 1 (19) disebutkan bahwa: "Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu".

Berbagai pengertian di atas menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan kurikulum tidak terbatas

dalam ruang kelas, melainkan mencakup juga kegiatan-kegiatan di luar kelas. Tidak ada pemisahan yang tegas antara intra dan ekstra-kurikulum. Semua kegiatan yang memberikan pengalaman belajar/ pendidikan bagi siswa pada hakikatnya adalah kurikulum (Hamalik, 2005).

2.1.2 Landasan Pengembangan Kurikulum

Bondi dan Wiles (1989) mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum yang terbaik adalah proses yang meliputi banyak hal yakni (1) kemudahan-kemudahan suatu analisis tujuan, (2) rancangan suatu program, (3) penerapan serangkaian pengalaman yang berhubungan, dan (4) peralatan dalam evaluasi proses ini. Secara singkat pengembangan kurikulum adalah suatu perbuatan kompleks yang mencakup berbagai jenis keputusan (Taba, 1962).

Agar kurikulum dapat berhasil sesuai dengan yang diinginkan memerlukan landasan-landasan dalam pengembangannya. Menurut (Depdikbud, 1986) bahwa landasan dan pengembangan kurikulum mengacu pada tiga unsur, yaitu (1) Nilai dasar yang merupakan falsafah dalam pendidikan manusia seutuhnya, (2) Fakta empirik yang tercermin dari pelaksanaan kurikulum, baik berdasarkan penilaian kurikulum, studi, maupun survei lainnya, dan (3) Landasan teori yang menjadi arahan pengembangan dan kerangka penyorotnya.

2.1.3 Komponen Kurikulum

Sebelum melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum, seorang pengembang kurikulum terlebih dahulu mengenal komponen atau elemen atau unsur kurikulum. Tyler sebagaimana dikutip oleh Taba (1962) mengemukakan pentingnya mengenal komponen atau elemen atau unsur kurikulum. Sementara itu, Herrick sebagaimana dikutip oleh Taba (1962) mengemukakan 4 (empat) elemen, yakni: tujuan (*objectives*), mata pelajaran (*subject matter*), metode dan organisasi (*method and organization*), dan evaluasi (*evaluation*). Sebagian ahli yang lain juga mengemukakan bahwa kurikulum terdiri dari 4 (empat) komponen dasar yakni (1) *aims, goals, and objective*, (2) *content*, (3) *learning activities*, dan (4) *evaluations* (Zais, 1976). Sukmadinata (1988) mengemukakan empat komponen dari anatomi tubuh kurikulum yang utama adalah tujuan, isi atau materi, proses atau sistem penyampaian, serta evaluasi.

2.1.4 Prinsip Pengembangan Kurikulum

Prinsip pengembangan kurikulum antara lain mencakup prinsip berorientasi pada tujuan, prinsip relevansi, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, prinsip fleksibilitas, prinsip integritas, prinsip kontinuitas, prinsip sinkronisasi, prinsip objektivitas, prinsip demokrasi dan prinsip praktis (Depdikbud, 1982). Dari berbagai prinsip pengembangan kurikulum tersebut, tiga di antaranya yang cukup penting, yaitu prinsip relevansi, prinsip kontinuitas, dan prinsip fleksibilitas (Sukmadinata, 2004).

Perlu disadari bahwa kurikulum harus mampu disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat dan waktu yang selalu berkembang tanpa merombak tujuan pendidikan yang harus dicapai (Depdikbud, 1982). Selain itu, perlu disadari juga bahwa kurikulum dimaksudkan untuk mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang, di sini dan di tempat lain, bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan berbeda (Sukmadinata, 1988).

2.1.5 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Pengembangan KTSP yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *(UU 20/2003)* tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19, Tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada SI dan SKL serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Selain itu, penyusunan KTSP juga mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam UU 20/2003 dan PP 19/2005.

KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah. Penyusunan KTSP untuk pendidikan khusus dikoordinasi dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan provinsi dan

berpedoman pada SI dan SKL serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP.

2.2 Kerangka Konseptual

Dalam rangka memperbaiki pelaksanaan pendidikan, BSNP menerbitkan panduan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP menurut BNSP (2006) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang mengandung tujuan pendidikan, struktur dan muatan, kalender pendidikan dan silabus.

Kurikulum tidak hanya harus dipahami oleh kepala sekolah dan guru, melainkan juga oleh peserta didik yang terlibat dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Oleh karena itu, sosialisasi kepada semua *stakeholder* internal dan eksternal menjadi penting dalam rangka menuju pada internalisasi konsep kurikulum baru yang dimaksud. Sehubungan dengan itu maka beberapa langkah dalam penerapan kurikulum baru hendaknya dilaksanakan dalam kerangka perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai hasil yang maksimal.

Berkaitan dengan KTSP sebagai konsep baru, diharapkan konsep ini dapat diterima oleh seluruh masyarakat pendidik dan peserta didik sebagai konsep yang baik. Di samping tahap sosialisasi yang biasanya dilakukan oleh pemerintah, tahap identifikasi kesiapan sekolah untuk menerima konsep baru tersebut perlu dilakukan. Hasil identifikasi ini akan memberikan gambaran kepada pemerintah bahwa akan terdapat beberapa golongan sekolah berdasarkan kesiapannya dalam mengimplementasikan KTSP. Dengan demikian, fasilitasi yang diberikan pemerintah ke sekolah-sekolah juga akan beragam tergantung pada kebutuhan masing-masing sekolah. Sekolah pun akan dapat mengevaluasi diri sudah sampai posisi mana kesiapan sekolah menghadapi kurikulum baru, dan bagi perguruan tinggi sebagai mitra pemda dan sekolah juga menjadi lebih terarah dalam melaksanakan pemberdayaan sekolah. Indikator-indikator kesiapan sekolah untuk menerapkan KTSP ini belum ada, sehingga perlu dilakukan kajian yang ditopang dengan data dan informasi aktual menggunakan metode ilmiah. Kerangka konseptual yang dibangun dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Komponen	Materi/proses	Kegiatan
Input	Informasi dari Pemerintah Pusat tentang KTSP, Persepsi Pemerintah Daerah, Sekolah, Pakar dan Pengamat Pendidikan serta peserta didik tentang KTSP, Data dan Informasi pendukung dari jurnal, buku dan laporan	Survey menggunakan kuesioner Focus Group Discussion (FGD) Telusur Pustaka
Proses	Analisis/kajian data dan informasi yang lengkap dan akurat, Bahan pemikiran pakar dan peneliti	Data Entry, sortasi, cleaning, Analisis data dan informasi Penulisan
Output	Laporan yang berisi data, fakta dan rekomendasi: indikator	Diseminasi hasil Publikasi
Outcome	Tindak lanjut pemerintah daerah/ pusat dalam memfasilitasi sekolah Tindak lanjut dari sekolah untuk evaluasi diri dan mengingkatkan kapasitas sekolah Tindak lanjut perguruan tinggi untuk membantu tercapainya tujuan sekolah	Rapat koordinasi dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, rekomendasi hasil penelitian disampaikan oleh Balitbang, Depdiknas kepada Menteri Merumuskan langkah konkrit untuk jangka panjang (lima tahunan)
Dampak	Langkah operasional baku untuk jangka waktu tertentu dari pemerintah daerah/pusat, sekolah dan perguruan tinggi KTSP mulai diterapkan dengan baik dan dapat dievaluasi hasilnya secara bertahap dan terus menerus Mutu pendidikan mulai meningkat	Kegiatan baru dalam jangka waktu tertentu Monitoring dan evaluasi
Mulai input, proses dan output dapat dikerjakan dan dipantau selama penelitian ini		

3. Metode Penelitian

3.1 Lokasi dan Waktu Kajian

Lokasi kajian adalah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Dipilihnya wilayah ini karena selain secara geografis merupakan wilayah penyangga pusat administrasi pendidikan, juga jumlah sekolah lanjutan atasnya cukup signifikan untuk mengambarkan *output* yang dicapai dari kajian ini. Di Kabupaten Bogor terdapat 57 SMA dan 48 MA, sedangkan di Kota Bogor terdapat 49 SMA dan 15 MA. Selain itu, dapat juga diartikan bahwa Kabupaten Bogor merepresentasikan kelompok wilayah dengan kinerja pendidikan rata-rata, sedangkan Kota Bogor merepresentasikan kelompok wilayah dengan kinerja pendidikan di atas rata-rata. Kegiatan penelitian ini berlangsung selama tiga bulan mulai dari 1 September sampai dengan 30 November 2006.

3.2 Populasi, Sampel, dan Responden

Populasi kajian ini adalah seluruh sekolah lanjutan atas di Kabupaten dan Kota Bogor. Sampel diambil secara tertuju pada dua kelompok SMA/MA negeri dan swasta di Kabupaten dan Kota Bogor (*cluster purposive sampling*). Selanjutnya, dari masing-masing sekolah terpilih ditentukan responden kajian dapat dilihat pada Tabel 2.

dalam bentuk pengetahuan atau kesadaran, sikap mental, persepsi (pejabat pemerintah, kepala sekolah, guru, pakar pendidikan, tokoh masyarakat/pengamat pendidikan, dan siswa) terhadap KTSP. Data sekunder yang diperlukan merupakan data dan informasi yang memberikan gambaran menyeluruh terhadap potensi sumber daya, perkembangan, kesesuaian lingkungan internal dan eksternal,

Tabel 2. Responden yang dijadikan sampel dalam kajian

Lokasi	Sekolah	Guru/sekolah	Pelajar/sekolah
Kota Bogor	3 SMA Negeri	45	60
	3 SMA Swasta	45	60
Kabupaten Bogor	3 SMA Negeri	45	60
	3 SMA Swasta	45	60
Total	12	180	240

Responden lain, selain guru dan siswa adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan komite sekolah, Kepala Dinas Pendidikan, anggota DPRD, pakar pendidikan, pemerintah daerah yang diwakili oleh Bapeda, tokoh masyarakat, pengamat pendidikan, LSM pendidikan, dan PGRI.

3.3 Kebutuhan Data

Kebutuhan data mencakup data primer dan data sekunder. Data dan informasi primer yang diperlukan

kebijakan pemerintah, dan lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder, pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan pelaksanaan FGD *stakeholder* sekolah. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei, yaitu melalui pengisian kuesioner yang dirancang untuk setiap kategori responden.

Instrumen pengumpulan data primer dikembangkan berdasarkan

dimensi, variabel, dan indikator untuk mengukur pemahaman konsep KTSP dan tingkat keselarasan implementasi pembelajaran dengan konsep KTSP yang disajikan dalam dokumen. Berdasarkan keterkaitan tersebut kemudian dikembangkan kuesioner untuk masing-masing kelompok responden.

3.5 Analisis Data

Analisis data diarahkan dalam mengkaji kesiapan, daya dukung dan merumuskan strategi implementasi KTSP.

Analisis deskriptif. Data yang diperoleh disederhanakan dalam bentuk tabel, gambar atau grafik, kemudian dianalisis secara deskriptif sesuai dengan aspek-aspek yang menjadi fokus kajian. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk dua tujuan, yaitu: (1) inventarisasi pemahaman konsep KTSP dan implementasi pembelajaran yang selaras dengan konsep KTSP, dan (2) evaluasi kesiapan sekolah dalam menerapkan KTSP.

Proses Hirarki Analitik (*analytical hierarchy process*) adalah suatu metode analisis yang dikembangkan dalam memecahkan masalah, yaitu dengan analisis logis eksplisit yang terdiri dari tiga prinsip pokok yaitu: Penyusunan hirarki, Penentuan prioritas, dan Konsistensi logis. Dalam metode proses hirarki analitik ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut : Identifikasi Sistem, Penyusunan Hirarki, Penyusunan Kuesioner.

Teknik analisis kuantitatif untuk tujuan evaluasi, yaitu analisis evaluasi kesiapan sekolah dalam penerapan KTSP didekati dengan analisis penjenjangan sekolah melalui pendekatan *Analytic Hierachy Process* (AHP). Dalam proses penjenjangan ini analisis dilakukan proses penggabungan nilai parameter aspek-aspek yang telah disusun secara terstruktur. Secara visual, persoalan kesiapan sekolah dalam implementasi KTSP distruk-turkan sebagai berikut (Diagram 1).

Dapat dilihat pada Diagram 1, problem "kesiapan sekolah dalam implementasi KTSP" dijabarkan ke dalam enam level yang dinamai "dimensi", "sub-dimensi", "variabel", "indikator/pertanyaan", dan "responden". Level 1 sampai dengan level 5 merupakan level tujuan, kriteria dan instrumen pengukuran. Level 6 yang paling bawah adalah level obyek pengukuran.

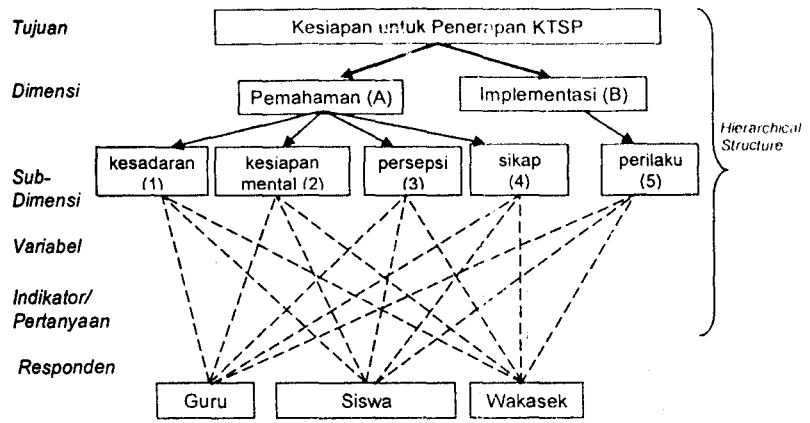

Diagram 1. Struktur hirarki permasalahan kesiapan implementasi KTSP

Analisis SWOT. Analisis SWOT yang akan dilakukan merupakan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal, melalui identifikasi faktor-faktor kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threats*). Dari hasil identifikasi faktor-faktor tersebut selanjutnya disusun strategi melalui bantuan matriks SWOT.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Kesiapan Sekolah

Pada umumnya sekolah (Wakil Kepala Sekolah urusan Kurikulum) belum familiar dengan landasan hukum penerapan KTSP. Tidak sampai separuh dari jumlah responden yang mengetahui bahwa KTSP berlandaskan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan yang familiar dengan PP tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan, serta panduan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tentang KTSP rata-rata hanya seperempat dari jumlah reponden. Komponen KTSP yang terdiri dari 4 (empat) unsur tujuan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan serta silabus, dipahami hampir oleh 75% jumlah responden.

Prinsip-prinsip pengembangan silabus dipahami oleh lebih dari 75%

jumlah responden, dan seluruhnya menyatakan bahwa di sekolah masing-masing silabus memuat uraian tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, sumber belajar sampai bahan ajar. Seluruh responden menjabarkan penyusunan silabus dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, dan tindak lanjut oleh masing-masing guru. Namun demikian, sekitar 10% jumlah responden mengaku bahwa silabus tidak pernah diimplementasikan.

Kesesuaian silabus yang disusun dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada standar isi (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006) dinyatakan sangat sesuai oleh lebih dari separuh jumlah responden, dan lainnya menyatakan cukup sesuai. Hal yang sangat dipertimbangkan dalam penyusunan silabus adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran tertentu, dan aktualitas, kedalaman, serta keleluasan materi pembelajaran dinyatakan oleh lebih dari 75% jumlah responden. Sedangkan yang cukup dipertimbangkan adalah mengenai tingkat kesulitan materi/hirarki konsep disiplin ilmu, relevansi karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, emosional, sosial dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan dan kebutuhan peserta didik, struktur keilmuan, serta alokasi waktu.

Lebih dari separuh jumlah responden menyatakan bahwa penyusunan KTSP mengacu sepenuhnya pada identifikasi standar isi dan identifikasi standar kompetensi, serta hampir seluruh responden menyatakan melakukan analisis terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program. Bahkan, hampir seluruh responden menyatakan bahwa analisis SWOT dalam penyusunan KTSP juga dilakukan. Umumnya responden menyusun KTSP dengan melibatkan unsur-unsur internal sekolah seperti guru, kepala sekolah, konselor/ pendamping, dan komite sekolah. Tidak terlihat adanya pihak luar yang terlibat, sehingga informasi tentang sosialisasi KTSP pun tidak banyak terungkap. Namun demikian, sekitar separuh responden menyatakan bahwa supervisi oleh Dinas Pendidikan sudah pernah terlaksana.

Penyusunan KTSP umumnya dilakukan dalam bentuk rapat kerja, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sampai siap terap adalah sekitar 2 bulan. Penerapan

dokumen KTSP sudah dilakukan oleh 67% jumlah sekolah responden yang dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah dan mendapat pertimbangan komite sekolah, tetapi hanya 23% yang diketahui oleh Dinas Pendidikan tingkat Propinsi. Sedangkan 25% dari jumlah responden belum mempunyai dokumen KTSP.

Mengenai kesiapan sekolah untuk mengimplementasikan KTSP, 67% dari jumlah sekolah responden menyatakan sangat siap, 23% cukup siap dan sisanya sekitar 10% menyatakan kurang siap. Sebanyak 90% responden menyatakan KTSP bagus dan setuju dengan penerapannya untuk masa-masa mendatang, namun hampir separuh di antaranya mengaku sulit dalam implementasi.

Hasil analisis deskriptif kuantitatif menunjukkan bahwa responden cukup paham terhadap KTSP (rataan skor 2.3), dan sangat siap untuk melaksanakan KTSP (rataan skor 2.6) (lihat Tabel 3). Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum responden cukup mendapatkan informasi tentang KTSP, walaupun di tingkat lapangan kesiapan implementasi ini belum dapat diwujudkan karena berbagai kendala seperti SDM/guru yang tidak menunjang, sarana pembelajaran yang terbatas, input kualitas awal siswa yang rendah dan sebagainya. Selain itu, diduga tingkat sosialisasi KTSP masih rendah. Kondisi seperti ini tidak terlalu aneh, karena memang sering terjadi pada program pemerintah yang orientasinya lebih pada *top-down approach* dibandingkan *bottom-up approach*.

Faktor penduga yang mempengaruhi tingkat pemahaman responden berada pada level sedang. Namun, rendahnya kesadaran responden terhadap keberadaan KTSP dapat ditutupi dengan sikap responden yang positif terhadap KTSP dan kesiapan mental dari guru dan siswa. Artinya, secara keseluruhan responden menerima dan mau melaksanakan KTSP.

Hasil analisis deskriptif kuantitatif terhadap responden Kabupaten dan Kota Bogor menunjukkan bahwa baik responden kabupaten maupun kota cukup memahami KTSP dan sangat siap mengimplementasikannya (Tabel 3). Walaupun rataan skor responden kabupaten lebih tinggi dari kota, tetapi masih pada kelas yang sama, sehingga dapat dinyatakan antara responden kabupaten dan kota Bogor tidak begitu berbeda dalam kesiapannya mengimplementasikan KTSP.

Tabel 3. Skor Kesiapan Sekolah di Kabupaten dan Kota Bogor dalam implementasi KTSP

TINGKAT KESIAPAN	KABUPATEN	KOTA	RATAAN SKOR
A. Pemahaman	2.3	2.3	2.3
Kesadaran	2.2	2.1	2.1
Kesiapan mental	2.4	2.4	2.4
Persepsi	2.3	2.3	2.3
Sikap	2.3	2.3	2.3
B. Implementasi	2.6	2.5	2.6

Keterangan: 1.0-1.6 = rendah; 1.67-2.3 = sedang; 2.4-3.0 = tinggi

Jika dilihat dari sisi kesiapan guru dan siswa dalam mengimplementasikan KTSP, rataan skor guru umumnya lebih tinggi dari rataan skor siswa (Tabel 4). Pemaheman guru lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemahaman siswa, namun tingkat kesiapan dalam mengimplementasikan KTSP sama-sama tinggi.

Jika siswa cukup sadar dalam memahami KTSP maka guru sudah sangat sadar. Selanjutnya, baik siswa maupun guru sudah siap mental menerima KTSP. Walaupun, persepsinya berbeda, lebih baik persepsi guru daripada siswa, namun dalam menyikapi KTSP baik guru maupun siswa tidak berbeda.

Berdasarkan Tabel 5, kesiapan siswa dan guru di kota dan kabupaten sama tingginya dalam mengimplementasikan KTSP. Namun demikian, pemahaman guru di kota dan kabupaten lebih tinggi dibanding dengan pemahaman siswa. Jika siswa cukup sadar dalam memahami KTSP, maka guru sudah sangat sadar. Selanjutnya, baik siswa maupun guru

Tabel 4. Skor Kesiapan Siswa dan Guru dalam mengimplementasikan KTSP

TINGKAT KESIAPAN	SISWA	GURU
A. Pemahaman	2.2	2.4
Kesadaran	1.9	2.4
Kesiapan Mental	2.4	2.4
Persepsi	2.2	2.3
Sikap	2.2	2.3
B. Implementasi	2.5	2.7

Keterangan: 1.0-1.6 = rendah; 1.7-2.3 = sedang; 2.4-3.0 = tinggi

Tabel 5. Skor Kesiapan Siswa dan Guru di Kota dan Kabupaten Bogor dalam implementasi KTSP

TINGKAT KESIAPAN	KOTA		KAB	
	SISWA	GURU	SISWA	GURU
A. Pemahaman	2.1	2.4	2.2	2.4
Kesadaran	1.8	2.4	1.9	2.4
Kesiapan Mental	2.4	2.4	2.4	2.4
Persepsi	2.2	2.4	2.4	2.4
Sikap	2.2	2.3	2.2	2.3
B. Implementasi	2.4	2.7	2.5	2.7

Keterangan: 1.0-1.6 = rendah; 1.7-2.3 = sedang; 2.4-3.0 = tinggi

di kota dan kabupaten sudah sangat siap mentalnya menerima KTSP dengan persepsi yang sama kecuali siswa kota lebih rendah. Namun, dalam menyikapi KTSP baik guru maupun siswa di kota dan kabupaten tidak berbeda.

4.2 Pemahaman terhadap KTSP

Sesuai dengan kerangka pikir operasional yang telah dikemukakan di muka, definisi operasional dimensi pemahaman adalah jawaban atas pertanyaan: "apakah seluruh *stakeholder* sekolah dari kepala sekolah hingga siswa dan komite sekolah mengetahui keberadaan dan mengerti makna UU No. 20 Tahun 2003, PP No. 19 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 22/2006, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23/2006 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24/2006. Makna di sini mencakup sub-dimensi kesadaran; kesiapan mental; persepsi; dan sikap.

4.2.1 Kesadaran

Guru pada umumnya (73% dari responden) lebih mengetahui tentang kebijakan untuk merancang dan mengimplementasikan KTSP yang dituangkan dalam Permendiknas No. 22/2006, Permendiknas No. 23/2006 dan Permendiknas No. 24/2006. Pada tingkat sekolah (kepsek atau wakasek bagian kurikulum), hanya 26% dan 22% siswa yang mengetahui tentang adanya wacana dan kebijakan untuk merancang dan mengimplementasikan KTSP. Walaupun pengetahuan akan adanya Permendiknas tentang KTSP cukup tinggi, namun data menunjukkan bahwa hanya 30% guru yang menyatakan mengetahui penyusunan KTSP dan 31% guru yang menyatakan mengetahui

struktur kurikulum. Namun demikian, guru lebih mengetahui pengertian dan konsep KTSP. Di sisi lain, sekolah dan siswa menyatakan mengetahui penyusunan KTSP, yaitu 88% dan 78%. Selain itu, juga sekolah dan siswa mengetahui struktur kurikulum yaitu 75% dan 66%.

kebijakan khusus untuk melaksanakan perubahan tersebut, yang juga lebih rendah dari persentase yang menjawab tahu akan wacana KTSP.

Hal lain yang menarik di sini juga adalah ternyata persentase responden yang menjawab "ya" untuk

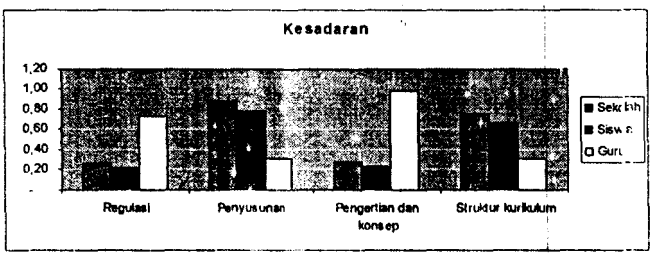

Grafik 1. Diagram potret kesadaran dalam pemahaman KTSP

Secara komprehensif, Grafik 1 menunjukkan tingkat kesadaran responden mengenai wacana KTSP di atas. Data menunjukkan bahwa walaupun responden mengetahui adanya wacana tentang KTSP atau walaupun mereka telah pernah membaca Permendiknas mengenai hal tersebut, belum berarti bahwa mereka mencermati apa yang diwacanakan tersebut secara substansial. Potret ini diperkuat oleh persentase responden yang menjawab "ya" untuk pertanyaan perlu tidaknya perubahan dalam pendekatan penyusunan kurikulum dan perlu tidaknya ada keempat pertanyaan di atas pada masing-masing kelompok responden juga berbeda. Secara visual, Grafik 1 menunjukkan bahwa responden kelompok sekolah, dan siswa yang menjawab tahu jauh lebih rendah dari kelompok responden guru. Demikian juga, kelompok respoden sekolah yang menjawab "ya" lebih tinggi dari siswa. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa ada kesenjangan informasi dan komunikasi dari jenjang sekolah, guru dan siswa.

4.2.2 Kesiapan Mental

Hal yang menggembirakan, walaupun tampaknya pemahaman akan KTSP masih simpang siur terutama pada kelompok responden guru yang ditunjukkan dari jawaban yang inkonsisten terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan, potret menunjukkan bahwa kesediaan dan kesiapan sekolah untuk melakukan perubahan telah cukup tinggi. Grafik 2 memperlihatkan bahwa responden yang menyatakan mereka bersedia mengimplementasikan KTSP di atas 70%.

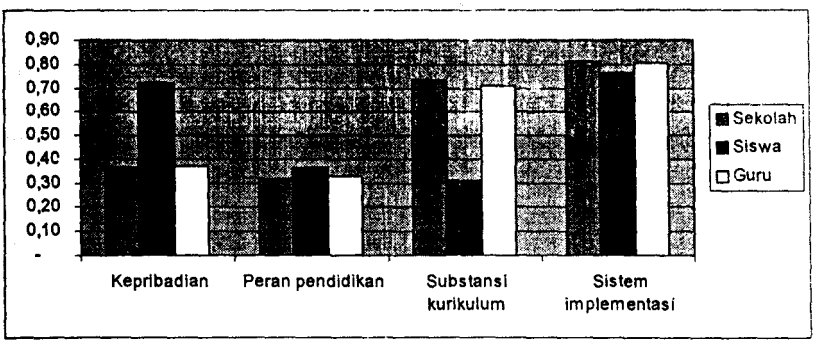

Grafik 2. Kesiapan mental dalam penerapan KTSP

Hampir semua (76-81%) sekolah dari tingkat kepsek, wakasek bagian kurikulum, guru, dan siswa menyatakan mereka bersedia mengubah cara pengelolaan pembelajaran, cara mengajar, dan cara belajar yang biasa dilakukan untuk mengimplementasikan KTSP, yaitu sistem implementasi. Alasan yang dikemukakan guru tidak bersedia untuk mengubah cara mengajarnya adalah karena beragamnya siswa, terbatasnya waktu, serta menganggap bahwa KTSP tidak menunjang otonomi pendidikan.

4.2.3 Persepsi terhadap KTSP

Substansi kurikulum harus mencakup pembekalan untuk: (1) pengembangan kepribadian, (2) penguasaan ilmu dan keterampilan, (3) berkarya, (4) bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan tingkat keahlian, serta (5) pemahaman kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Pemahaman akan konsep kompetensi serta

elemen-elemen yang terkandung di dalamnya tersebut merupakan tahap pertama yang harus dimiliki sekolah untuk melaksanakan KTSP, dan konsep elemen-elemen ini harus diterjemahkan menjadi suatu rancangan pembelajaran yang operasional sehingga paradigma dan pendekatan kegiatan "pembelajaran" bergeser dari berfokus pada "materi" menjadi berfokus pada "kompetensi" hasil didik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap KTSP, sesungguhnya memerlukan perubahan pendekatan pada pengembangan kurikulum yang berbasis pada potensi diri.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata tidak semua responden menyatakan hal tersebut. Pada tingkat guru, faktor potensi diri lebih tinggi dibandingkan pada tingkat sekolah dan siswa. Sedangkan tingkat guru lebih tinggi dari siswa. Dalam hal ini, faktor lingkungan lebih tinggi dimiliki oleh siswa daripada guru dan pihak sekolah (Grafik 3).

4.2.4 Sikap terhadap KTSP

Seperti telah dikemukakan, pengukuran sikap dilakukan dengan metode *Ordered Alternatives for Assessing Attitude Structure* (yaitu *Latitudes of Acceptance, Rejection, and Non-commitment)* dengan menggunakan sembilan butir pernyataan. Diyakini bahwa apabila secara teknis penyusunan alat lebih optimal maka akan diperoleh gambaran sikap yang berdaya-beda *(distinctive)* tinggi, dengan nilai-ramal *(predictive value)* yang kuat. Dalam hal ini, sikap digolongkan

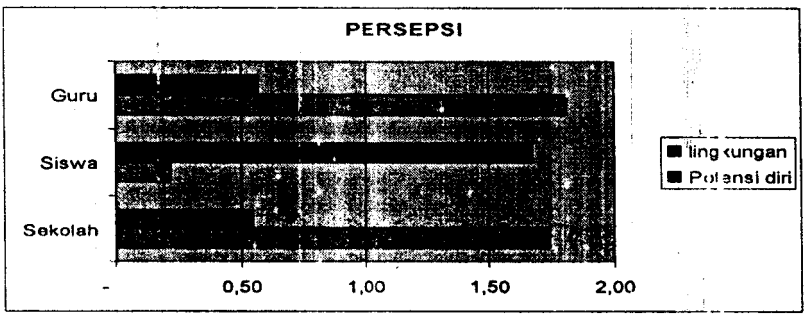

Grafik 3. Persepsi responden mengenai KTSP berdasarkan faktor yang

menjadi 3 hal, yaitu proses pembelajaran, ruang lingkup kurikulum dan evaluasi pelaksanaan.

Gambaran sikap secara menyeluruh terhadap implementasi KTSP adalah sebagai berikut. (1) Pernyataan yang paling diterima di dalam *latitude of acceptance* adalah: "sekolah tidak menaruh perhatian akan kualitas informasi tentang KTSP sehingga tidak terbentuk suasana yang kondusif untuk mengimplementasikan KTSP". Apabila ditempatkan dalam urutan valensi *favorableness-unfavorableness* dalam instrumen berskala 1-5, sikap ini dapat disetarakan dengan angka 3,5 pada subdimensi lainnya. (2) Pernyataan yang penolakannya paling kuat di dalam *latitude of rejection* adalah: "Selama belum ada kesepakatan tentang rumusan KTSP baku, sekolah di kota dan kabupaten Bogor saat ini tidak perlu mengubah proses pembelajaran, ruang lingkup dan evaluasi maupun administrasinya hanya untuk melaksanakan KTSP" (Grafik 4). (3) Dari dua titik ekstrim pernyataan yang dirancang, pernyataan yang paling ditolak (butir 2) tepat sama dengan salah satu ekstrim yang bersifat *unfavorable* terhadap objek sikap. Demikian pula salah satu pernyataan dalam *latitude of rejection* yaitu: "Secara umum guru pada saat ini belum menunjukkan antusiasme dan kesiapan untuk melaksanakan KTSP, meskipun sudah diterbit-kan landasan hukumnya". (4) Dari ad.2 dan ad.3. tersebut di atas dapat dikatakan bahwa dirasakan perlunya sekolah mengubah proses pembelajaran, meskipun tidak selalu harus dilakukan untuk semata-mata

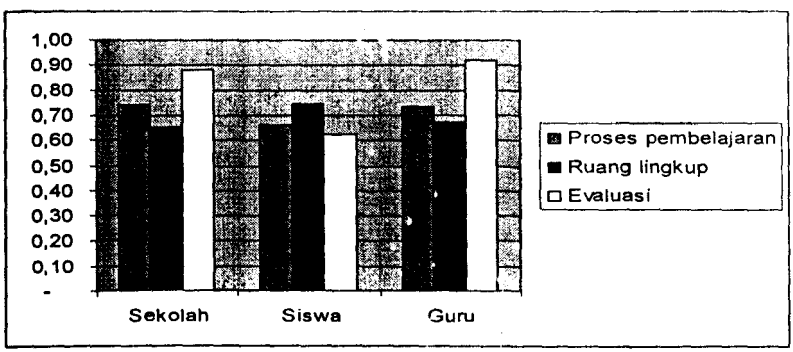

Grafik 4. Sikap Responden mengenai KTSP

melaksanakan KTSP. Antusiasme dan kesiapan guru juga sudah ada meskipun perlu dikaji secara mendalam, wujud kesiapan dan cara memelihara semangat untuk mengikuti perubahan yang ada.

4.3 Implementasi KTSP

Seperti telah dikemukakan dalam kerangka pikir operasional, definisi dimensi implementasi adalah jawaban atas pertanyaan: "sampai sejauh manakah sistem dan pelaksanaan KTSP saat ini sudah selaras dengan paradigma implementasi KTSP?". Informasi yang perlu dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan ini meliputi subdimensi: (a) apakah mekanisme pengembangan kurikulum, silabus, dan RPP sudah diturunkan dari suatu analisis kebutuhan yang kemudian dirumuskan menjadi kompetensi lulusan yang ingin dihasilkan? (b) apakah kurikulum, silabus, dan RPP sudah mengacu pada upaya untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang ingin dihasilkan? (c) apakah rancangan pembelajaran yang tertuang dalam RPP sudah memperlihatkan nuansa *student-oriented, active learning, problem solving oriented*, dan lain-lain? serta (d) apakah perilaku guru dalam proses pembelajaran menunjukkan sikap profesionalisme yang tinggi (menguasai materi ajar, cara mengorganisasikan situasi belajar, karakteristik siswanya, metode evaluasi hasil belajar, dan interaksi dengan siswa).

Potret mengenai implementasi KTSP terdiri dari komponen rujukan standar, persiapan guru dan siswa serta persiapan sekolah baik dari segi SDM maupun persiapan fisik (gedung, laboratorium dan perpus-

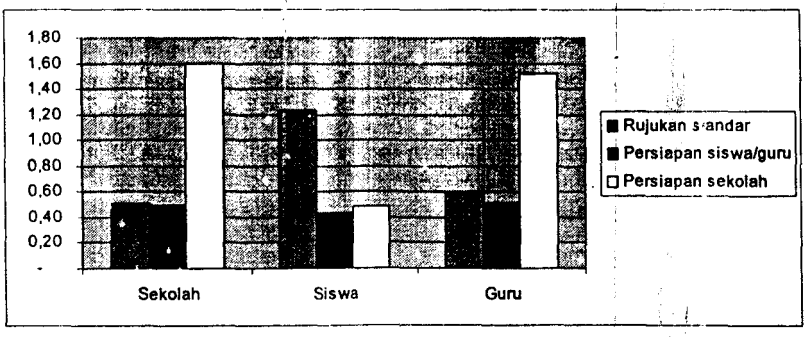

Grafik 5. Perilaku tentang implementasi responden mengenai KTSP

takaan) secara mayoritas responden persiapan sekolah dan guru menyatakan bahwa pelaksanaan di lingkungan guru didahului oleh suatu analisis kebutuhan yang hasilnya kemudian dirangkum menjadi rumusan kompetensi lulusan, sehingga mereka menyatakan bahwa rujukan standar telah memiliki rumusan tertulis mengenai kompetensi lulusannya. Grafik 5 menunjukkan bahwa baik pihak guru dan siswa menyatakan siap melakukan pelaksanaan KTSP. Selain itu, potret sekolah dan guru memiliki persiapan sekolah lebih dari siswa dalam mengimplementasikan KTSP. Sosialisasi KTSP dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam bentuk penyebaran Permendiknas, lokakarya, pelatihan, seminar, diskusi, ceramah, dan rapat-rapat internal dengan guru mata ajaran dan pembentukan kelas-kelas kecil.

4.4 Analisis SWOT

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal sekolah berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta kondisi eksternal sekolah yang meliputi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang berpengaruh terhadap kesiapan sekolah dalam implementasi KTSP maka selanjutnya diidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancamannya. Hasil analisis tersebut digunakan untuk merumuskan alternatif strategi yang digunakan untuk mempersiapkan penerapan KTSP ke dalam analisis SWOT.

Setelah mengetahui kondisi secara umum sekolah saat ini dan diperoleh inti kesiapan sekolah dalam menerapkan KTSP maka selanjutnya disusun faktor-faktor strategi kesiapan sekolah dalam menerapkan KTSP dengan menggunakan matriks SWOT. Matriks SWOT kesiapan sekolah dapat dilihat pada Tabel 6.

A. Strategi S – O

Kolom strategi S – O adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Beberapa strategi yang dapat digunakan berkenaan dengan strategi ini adalah (1) Mempertahankan dan meningkatkan kualitas manajemen sekolah. Manajemen sekolah perlu ditingkatkan kualitasnya misalnya dengan program *study visit* yang dilakukan oleh kepala sekolah ke sekolah lain yang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi. Ber-bagai hal yang dapat memberikan nilai positif bagi perkembangan sekolah perlu diupayakan untuk diterapkan. Program ini dapat

diajukan ke pemerintah atau ke lembaga lain yang dianggap peduli dan dapat bekerja sama dalam upaya peningkatan manajemen sekolah. (2) Memelihara dan mempertahankan jaringan kerja sama dengan pihak luar. Dukungan eksternal dan kerjasama dengan pihak luar seperti Pemda, Perguruan Tinggi dan sekolah lain dapat diarahkan pada upaya peningkatan pemahaman terhadap KTSP. Hal ini dapat dilakukan melalui *workshop, study visit,* seminar, pelatihan, dan tukar pengalaman tentang pemahaman dan penerapan KTSP.

B. Strategi W - O

Kolom strategi W – O adalah strategi yang dipakai oleh sekolah untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada. Beberapa strategi yang dapat digunakan adalah (1) Melakukan

Tabel 6. Perumusan strategi kesiapan sekolah dalam implementasi KTSP

INTERNAL / EKSTERNAL	STRENGTH – S S1. Sarana memadai S2. Kualifikasi guru S3. Kedisiplinan S4. Adanya perhatian pada KTSP S5. Dukungan masyarakat setempat S6. Pengalaman, prestasi dan dukungan sekolah	WEAKNESS – W W1. Jumlah kelas terbatas W2. SDM siswa kurang kreatif W3. Sosialisasi KTSP W4. Kurikulum tidak terencana
OPPORTUNITIES – O O1. Adanya dukungan pihak dari luar O2. Manajemen sekolah cukup baik O3. Metode belajar cukup baik	STRATEGI S – O 1. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas manajemen sekolah (O1,O2,O3,S1,S2,S3,S5) 2. Memelihara dan mempertahankan jeringan kerja sama dengan pihak luar (O1,O2,S4,S5,S6)	STRATEGI W – O 1. Melakukan perbaikan dan melengkapi sarana sekolah (O1,O2,W1,W3) 2. Melakukan pelatihan untuk guru (O1,O2,O3, W3,W4) 3. Meningkatkan motivasi siswa (O1,O2,O3,W2)
THREATS – T T1. Tingkat sosial ekonomi orang tua siswa rendah T2. SDM guru dan siswa rendah T3. Beban belajar tinggi T4. Aturan kurikulum tidak konsisten	STRATEGI S – T 1. Meningkatkan disiplin dalam proses belajar mengajar (T1,T2,T3,S2,S3,S6) 2. Melakukan kualitas alumni (T1,T3,T4,S1,S2,S5)	STRATEGI W – T 1. Mempertahankan mutu SDM di sekolah (T2,T3, T4,W2,W3,W4) 2. Meningkatkan mutu pembelajaran dan kemandirian siswa (T1,T2,T3,W1,W2,W3)

perbaikan dan melengkapi sarana sekolah. Peluang kerja sama dan dukungan eksternal dapat diarahkan untuk perbaikan dan kelengkapan sarana sekolah terutama yang berkaitan dengan fasilitas labo-ratorium, peralatan teknologi informasi, ruangan dan perlengkapan kelas serta sarana olahraga. (2) Melakukan pelatihan untuk guru dalam implementasi KTSP. Pening-katan SDM guru perlu dilakukan untuk mendukung penerapan KTSP. Variabel yang berkaitan dengan SDM guru meliputi kesesuaian mata ajaran dengan latar belakang pendidikan guru, metode pembelajaran yang digunakan, motivasi mengajar, dan kreativitas. (3) Meningkatkan moti-vasi siswa dalam KBM. SDM siswa perlu ditingkatkan dalam hal motivasi belajar (belajar berkelompok, pelatihan *life skills*, belajar di ruangan rileks dan penambahan jam pelajaran yang diujikan tingkat nasional).

C. Strategi S – T

Kolom strategi S-T adalah strategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki sekolah untuk menghindari ancaman yang ada. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh sekolah adalah (1) Meningkatkan disiplin dalam proses belajar mengajar. Disiplin yang sudah diterapkan oleh guru dan siswa, kompetensi guru dalam proses pembelajaran perlu dipertahankan dan sekaligus ditingkatkan sambil mengupayakan kelengkapan dan perbaikan sarana sekolah. (2) Meningkatkan mutu alumni. Upaya peningkatan kualitas alumni untuk meningkatkan daya saing lulusan. Selain itu, alumni merupakan aset sekolah dalam mempromosikan sekolah dan indikator mutu sekolah.

D. Strategi W – T

Kolom strategi W-T adalah strategi sekolah untuk berusaha meminimalkan kelemahan yang dimiliki dengan berusaha menghindar dari ancaman yang ada. Strategi yang dapat dilakukan adalah (1) Mempertahankan mutu sumber daya manusia di sekolah. Kekurangan sarana pendidikan, selain melalui upaya perbaikan sarana yang bersangkutan perlu dikelola dengan meningkatkan kualitas SDM dan proses pembelajaran. Kualitas SDM yang baik tidak akan tergantung sepenuhnya pada fasilitas dan sarana yang lengkap. (2) Meningkatkan mutu pembelajaran dan kemandirian siswa. Upaya peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilakukan melalui perbaikan metode, media dan evaluasi pembelajaran. Sedangkan untuk pening-

katan kemandirian dan disiplin siswa dalam proses pembelajaran dilakukan tugas kelompok, tugas individu dan diskusi kelompok.

5. Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari kajian di atas adalah:

Secara umum SMA di Kota dan Kabupaten Bogor, baik swasta maupun negeri memiliki tingkat pemahaman yang cukup tentang KTSP. Rataan skor 2,3, berada dalam kategori tingkat pemahaman sedang (1,7-2,3). Selain itu, mereka juga menyatakan siap untuk melaksanakan KTSP dengan rataan skor 2,6 berada pada kategori tinggi (2,4-3,0). Data ini menunjukkan bahwa SMA-SMA di Kabupaten dan Kota Bogor telah memperoleh informasi yang cukup tentang KTSP, baik informasi dari Dinas Pendidikan setempat, informasi dari media massa, akses ke internet, dan sebagainya. Namun demikian, kesiapan implementasi tersebut belum dapat diwujudkan secara konkrit di tingkat lapangan karena berbagai kendala antara lain kualitas SDM guru yang tidak menunjang, sarana pembelajaran yang terbatas, input kualitas awal siswa yang rendah, tingkat pemahaman yang beragam tentang KTSP dan sebagainya. Hal ini sebagai akibat proses sosialisasi KTSP yang belum merata ke semua guru dan belum ditindaklanjuti dengan pelatihan guru untuk menyusun KTSP.

Beberapa indikator kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan KTSP adalah: (1) Aspek sekolah (kesadaran tentang penyusunan kurikulum, kesiapan mental tentang sistem implementasi KTSP, persepsi sekolah terhadap faktor potensi diri, sikap terhadap sistem evaluasi dan persiapan sekolah sebagai implementasi sekolah), (2) Aspek guru (kesadaran tentang pengertian dan konsep KTSP, kesiapan mental tentang sistem implementasi, persepsi guru terhadap faktor potensi diri, sikap terhadap sistem evaluasi dan persiapan sekolah sebagai implementasi guru), (3) Aspek siswa (kesadaran tentang penyusunan kurikulum, kesipan mental tentang sistem implementasi, persepsi siswa terhadap faktor lingkungan, sikap terhadap ruang lingkup KTSP, perilaku siswa tehadap rujukan standar KTSP sebagai implementasi KTSP).

Strategi dan langkah-langkah operasional yang perlu ditempuh dalam mempersiapkan penerapan KTSP adalah (1) meningkatkan kualitas manajemen sekolah, (2)

jaringan kerja sama dengan pihak lain dan mengembangkan jaringan kerja sama baru yang diarahkan pada peningkatan kesiapan dalam mengimplementasikan KTSP terutama jaringan dengan alumni sekolah, (3) melakukan perbaikan dan melengkapi sarana sekolah seperti fasilitas laboratorium, peralatan teknologi informasi, ruangan dan perlengkapan kelas serta sarana olahraga, (4) melakukan pelatihan untuk guru, (5) meningkatkan motivasi siswa, (6) meningkatkan disiplin dalam proses belajar mengajar, (7) meningkatkan kualitas alumni, (8) mempertahankan mutu SDM di sekolah, dan (9) meningkatkan mutu pembelajaran dan kemandirian siswa.

5.2 Saran

Mencermati temuan yang diperoleh pada kegiatan kajian kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) beberapa hal yang perlu direkomendasikan untuk segera ditindaklanjuti adalah sebagai berikut.

Mengingat KTSP merupakan kurikulum terbaru yang telah dilengkapi dengan beberapa landasan hukum, dan belum meratanya penyebaran informasi KTSP di tingkat sekolah maka sangat penting untuk melakukan sosialisasi kurikulum baru tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang terdiri dari Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, Guru, Komite Sekolah dan orang tua, Dewan Pendidikan serta para siswa.

Pelaksanaan sosialisasi perlu dilakukan secara merata kepada seluruh sekolah (tingkat satuan pendidikan) di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan tim pelaksana sosialisasi mulai dari tingkat pusat sampai tingkat Kabupaten. Unsur yang dapat dilibatkan sebagai tim sosialisasi adalah Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Perguruan Tinggi.

Beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam 3 tahun menyongsong penerapan penuh KTSP pada tahun 2009 dapat dipilah berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait sebagai berikut.

a. Pemerintah

Mempersiapkan panduan sosialisasi KTSP, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana, standar penilaian, standar proses pembelajaran, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta anggaran yang berkaitan dengan persiapan dan implementasi KTSP.

b. Sekolah

Mengikuti sosialisasi KTSP yang diselenggarakan di tingkat sekolah maupun kabupaten terhadap seluruh unsur kependidikan (tim manajemen sekolah, guru, siswa, komite sekolah). Sekolah juga perlu melaksanakan rapat kerja dalam rangka penyusunan KTSP masing-masing sekolah, menyempurnakan penyusunan KTSP, menginventarisir faktor pendukung implementasi KTSP, dan memulai implementasi KTSP.

c. Perguruan Tinggi

Merancang dan menyelenggarakan TOT berjenjang (dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten, dan tingkat sekolah) dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan workshop KTSP. Perancangan TOT dilengkapi dengan produksi modul dan metode serta media TOT.

Keragaman sekolah perlu diakomodir agar implementasi KTSP di setiap sekolah dapat terselenggara sesuai dengan potensi sekolah yang bersangkutan. Skala prioritas perlu ditetapkan untuk mengatasi kendala yang beragam pada sekolah-sekolah tertentu.

Tiga tahun setelah KTSP diimplementasikan disarankan untuk dilaksanakan pemetaan pada sekolah yang telah mengimplementasikan KTSP secara menyeluruh yang memenuhi ciri-ciri implementasi KTSP. Apabila dari hasil pemetaan tersebut masih terdapat SMA yang belum mengimplementasikan, maka pemerintah perlu membantu, mendorong sekolah tersebut untuk lebih mempercepat penerapannya.

Pustaka Acuan

Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.* Jakarta: BSNP, Depdiknas.

Bondi, Joseph dan Jon Wiles. 1989. *Curriculum Development: A Guide to Practice.* Columbus: Merril Publishing Company, A Bell & Howel Information Company.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta*

Departemen Pendidikan Nasional. 2006. "Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006

Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah", Jakarta: Depdiknas

Departemen Pendidikan Nasional. 2006. "Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Isi kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah", Jakarta: Depdiknas

Departemen Pendidikan Nasional. 2006. "Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 tahun 2006 dan No. 23 tahun 2006. Jakarta: Depdiknas

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1982. *Pengembangan Kurikulum dan Sistem Instruksional (Modul)*. Jakarta: Depdikbud.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1986. *Kurikulum: Landasan, Program dan Pengembangan*. Jakarta: Depdikbud.

Hamalik, Oemar. 2005. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 1988. *Prinsip dan Landasan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Depdikbud.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2004. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Taba, Hilda. 1962. *Curriculum Development: Theory and Practice*. New York: Harvourt Brace Jovanovich, Inc.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003. Jakarta: Media Abadi.

Zais, Robert S. 1976. *Curriculum: Principles and Foundation*. New York: Harper & Row Publisher.